

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab III, penulis menyimpulkan beberapa hal mengenai penerapan PSAK 72 pada PT Summarecon Agung Tbk, diantaranya sebagai berikut.

- 1) PT Summarecon Agung Tbk menerapkan kebijakan akuntansi pendapatan secara umum sesuai standar akuntansi keuangan yang baru berlaku efektif per 1 Januari 2020 yaitu PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Perusahaan mengklasifikasikan pendapatannya ke dalam tiga kelompok di mana yang tergolong ke dalam pendapatan dari kontrak dengan pelanggan adalah pendapatan pengembang properti dan pendapatan lain-lain.
- 2) Berpedoman pada PSAK 72, PT Summarecon Agung Tbk telah mengakui semua pendapatan kontrak dengan pelanggan yang berasal dari segmen pengembang properti dan lain-lain ketika terlaksananya *performance obligation* yang ditandai dengan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan sekaligus berpindahnya hak pengendalian atas aset kepada pelanggan. Dikarenakan manfaat aset tersebut tidak diterima secara simultan

oleh pelanggan, maka pendapatan harus diakui pada waktu tertentu (*at single point in time*). Berbeda dengan aturan sebelumnya, pendapatan dari apartemen diakui secara bertahap berdasarkan persentase penyelesaian oleh perusahaan.

- 3) Sesuai dengan PSAK 72, PT Summarecon Agung Tbk telah mengukur pendapatannya berdasarkan harga transaksi yang mencerminkan jumlah imbalan yang berhak diterima oleh entitas sesuai yang dijanjikan dalam kontrak. Untuk harga transaksi yang mengandung unsur variabel, imbalan perlu diestimasi ulang lalu dikurangkan dengan perkiraan jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama kontrak berlangsung. Harga transaksi dialokasikan ke masing-masing kewajiban pekerjaan menggunakan harga jual berdiri sendiri relatif melalui pendekatan biaya ekspektasian ditambah margin. Apabila, di tengah periode kontrak terjadi revisi terhadap harga transaksi maka perusahaan memperlakukannya sebagai penghentian kontrak.
- 4) PT Summarecon Agung Tbk telah menyajikan pendapatan, aset kontrak, dan liabilitas kontrak seperti yang diatur dalam PSAK 72. Perusahaan menyajikan pendapatan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, liabilitas kontrak sebagai uang muka dari pelanggan pada pos liabilitas di neraca dan piutang usaha sebagai *unconditional rights* yang tertera pada pos aset di neraca. Dalam hal ini, tidak terdapat akun aset kontrak di dalam laporan posisi keuangan entitas.
- 5) PT Summarecon Agung Tbk telah mengungkapkan informasi mengenai pendapatan sesuai PSAK 72 yang mencakup kontrak dengan pelanggan, pertimbangan yang signifikan, dan aset yang diakui untuk memperoleh

kontrak. Namun, terdapat beberapa informasi yang tidak diungkapkan secara detail yakni terkait kewajiban kinerja, mutasi saldo piutang usaha dan liabilitas kontrak, perhitungan dan pengalokasian harga transaksi, serta pemisahan nilai kerugian ECL untuk tiap jenis piutang usaha.

- 6) Diterapkannya PSAK 72 secara resmi pada awal 2020, perusahaan harus menyesuaikan beberapa saldo akun per 1 Januari 2020 di dalam laporan posisi keuangan dan mereklasifikasikan saldo uang muka dari pelanggan ke liabilitas kontrak. Perubahan berupa kenaikan atau penurunan komponen laporan keuangan pada dua periode akuntansi, 2019 dan 2020, perusahaan tidak menderita kerugian yang signifikan akibat penerapan PSAK 72. Hanya saja adanya penyesuaian pada biaya keuangan bersih yang menurunkan laba tahun berjalan dan penyajian kembali saldo awal laba ditahan yang menyebabkan saldonya per 31 Desember 2020 secara kumulatif turun.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan penulis, ternyata masih didapati kelemahan dalam penerapan PSAK 72 pada PT Summarecon Agung terutama dalam hal pengungkapan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Maka dari itu, berikut saran yang ingin diberikan penulis agar penerapan akuntansi pendapatan lebih baik lagi untuk periode selanjutnya.

- 1) Untuk menghindari kesalahpahaman pengguna laporan, perusahaan sebaiknya mencantumkan secara eksplisit mana saja pendapatan yang masuk ke kontrak dengan pelanggan, asal usul perhitungan harga transaksi, dan informasi yang cukup mengenai kewajiban pelaksanaan.

- 2) Perusahaan perlu mengungkapkan pergerakan saldo masuk dan keluar dari liabilitas kontrak perusahaan, seperti berapa jumlah liabilitas kontrak yang diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan pada tahun bersangkutan.
- 3) Selain dikelompokkan menurut jenis usahanya, piutang perlu dibedakan antara jumlah yang memiliki unsur pembiayaan dengan yang tidak memiliki unsur pembiayaan. Rugi penurunan nilai piutang juga sebaiknya dipisahkan per masing-masing piutang untuk menghasilkan nilai piutang secara neto.

Pengungkapan-pengungkapan tersebut dianggap mampu memberikan informasi yang akurat dan terpercaya bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.